

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap permohonan pailit oleh buruh terhadap perusahaan. Buruh sebagai kreditor yang diutamakan pelunasan utangnya pada kepailitan menjadi terbatas dalam memperoleh haknya ketika berada pada posisi pemohon pernyataan pailit yang disebabkan oleh pengaturan mengenai penghitungan kreditor pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menempatkan Buruh sebagai satu utang, hal ini berdampak pada kegagalan Buruh dalam memenuhi syarat 2 kreditor atau lebih untuk dikabulkannya permohonan pernyataan pailit. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi lapangan dan analisis putusan pengadilan sebelum dan sesudah SEMA diberlakukan. Salah satu kasus yang dianalisis adalah Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 antara PT Pandanarum Kenanga Textile (PT PANAMTEX) melawan Budi Purwanto dan Sukanto, yang menunjukkan bagaimana permohonan pailit oleh buruh ditolak berdasarkan interpretasi SEMA tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA membatasi ruang buruh untuk mengajukan pailit, meskipun secara hukum buruh tetap diakui sebagai kreditor preferen. Hal ini menimbulkan dilema hukum ketika hak buruh tidak dibayar, namun permohonan pailit tidak dapat diterima. Penelitian menyimpulkan perlunya regulasi alternatif yang lebih adil guna melindungi hak buruh dalam proses kepailitan.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Buruh, SEMA No. 2 Tahun 2019, Hubungan Industrial, Permohonan Pailit.

## **ABSTRACT**

*This study discusses the legal implications of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2019 on bankruptcy petitions filed by workers against companies. Workers, as creditors with priority in debt repayment during bankruptcy proceedings, face limitations in exercising their rights when acting as petitioners for a bankruptcy declaration. This is due to the regulation on creditor calculation under SEMA No. 2 of 2019, which treats all workers as a single debt. As a result, workers often fail to meet the requirement of having two or more creditors for a bankruptcy petition to be granted.*

*The method used in this study is empirical juridical, utilizing field study approaches and analyzing court decisions before and after the enactment of the SEMA. One case analyzed is Decision Number 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 between PT Pandanarum Kenanga Textile (PT PANAMTEX) and Budi Purwanto and Sukanto, which illustrates how a bankruptcy petition filed by workers was rejected based on the interpretation of the SEMA.*

*The research findings indicate that the SEMA limits workers' ability to file for bankruptcy, even though they are legally recognized as preferred creditors. This creates a legal dilemma when workers' rights are not fulfilled but their bankruptcy petition is inadmissible. The study concludes that there is a need for alternative and fairer regulation to protect workers' rights in bankruptcy proceedings.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Workers, SEMA No. 2 of 2019, Industrial Relations, Bankruptcy Petition.*